

Judul : Pro kontra insentif guru penanggung jawab MBG
Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pro Kontra Insentif Guru Penanggung Jawab MBG

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru Penanggung Jawab Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Penerima Manfaat. Surat itu ditekankan Kepala BGN Dadan Hindayana pada Senin, 29 September 2025. "Pemberian insentif ini bukan sekadar kompensasi finansial, melainkan bentuk pengakuan

atas dedikasi dan kontribusi guru dalam mendukung keberhasilan program," tulis surat edaran tersebut. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, belum melakukan pembahasan mengenai rencana guru sebagai penanggung jawab program tersebut. Ia akan mencoba membahas insentif guru itu dalam Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pelaksanaan

MBG. Perpres saat ini masih proses. "Tunggu sampai Peraturan Presiden keluar, baru nanti kami sampaikan," kata dia yang memastikan rencana pemberian insentif itu belum diputuskan. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani setuju dan mendukung upaya Pemerintah yang ingin memberikan insentif kepada para guru yang ikut serta dalam menyelesaikan program

MBG. Menurut dia, pemberian insentif merupakan niat baik dari Pemerintah kepada para guru atas berbagai dedikasinya. "Kami menghargai niat baik dari BGN," kata Lalu. Namun, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri kurang sepatutnya dengan pemberian insentif bagi guru. Baginya, pemberian insentif bagi

guru penanggung jawab program MBG di sekolah adalah bentuk lepas tangan. "Menurut kami dengan terbitnya SE ini patut diduga BGN mencoba lepas tangan dari tanggung jawab terhadap fenomena keracunan MBG di sekolah," kata Iman. Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara Lalu Hadrian Irfani dan Iman Zanatul Haeri terkait insentif bagi guru.

LALU HADRIAN IRFANI,
Wakil Ketua Komisi X DPR

Yang Dilakukan BGN Bentuk Terima Kasih



“Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh BGN ini sebagai bentuk terima kasih kepada guru-guru kita yang telah mengurus MBG di masing-masing sekolahnya.

Pemerintah melalui BGN akan memberikan insentif 100 ribu bagi guru yang menjadi penanggung jawab program MBG. Apa pendapat Anda?

Langkah yang dilakukan BGN ini kami apresiasi dan kami hormati. Ya, pada prinsipnya kami menghargai niat baik dari BGN yang ingin memberikan insentif kepada para guru.

Dan sebenarnya, apa yang dilakukan oleh BGN ini sebagai bentuk terima kasih kepada guru-guru kita yang telah mengurus MBG di masing-masing sekolahnya.

Kenyataan di lapangan, yang mengurus MBG ketika sudah didis tribusikan ke sekolah, ya para guru.

Menurut Anda, apakah angka 100 ribu cukup atau perlu ditambah?

Kalau boleh di bilang angka 100 ribu itu masih kurang cukup dan masih kurang layak. Iah.

Berapa layaknya? Setidaknya 10 hari, 300 ribu. Jadi, kalau dikalkulasikan selama sebulan itu mencapai 900 ribu. Ya, dibulatkan 1 juta lah. Saya kira cukup lah untuk menambah pemasukan.

Saya rasa angka yang layak dan layak itu mencapai 900 ribu. Ya, dibulatkan 1 juta lah. Saya kira cukup lah untuk menambah pemasukan.

Lalu, apa yang Anda lakukan untuk merealisasikan besaran angka tersebut? MBG ini kan di anggar dari anggaran pendidikan. Otomatis kami di Komisi X DPR tentu akan mengawasi. Tetapi, perlu diingat bahwa

BGN ini bukan mitra langsung dari Komisi X, sehingga kami di dalam memberikan usulan, masukan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pak Menteri dengan seluruh jajaran akan berkomunikasi dengan BGN.

Ada yang menilai ketika misalnya diberikan insentif 100 ribu tapi bebannya guru menjadi lebih berat. Bagaimana? Saya kurang sepatutnya kalau para guru harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan MBG di sekolah ketika ada masalah seperti keracunan. Yang bertanggung jawab tetap BGN.

Karenanya, untuk menghindari berbagai masalah, dapur dapur atau SPPG yang bermasalah dan melang gar SOP ditutup. ■ REN

IMAN ZANATUL HAERI,
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G

Kami Menolak Guru Jadi Penanggung Jawab



“Kami khawatir ke depan guru yang akan disalahkan jika terjadi keracunan karena berstatus penanggung jawab.

Apa pendapat Anda terkait besaran insentif 100 ribu bagi guru di dalam program MBG?

Kami mempertanyakan besaran insentif bagi guru sebesar 100 ribu rupiah per hari sebagai penanggung jawab MBG di sekolah.

Kenapa? Angka 100 ribu rupiah tidak sebanding dengan tanggung jawab keracunan siswa yang semestinya bisa dicegah.

Kami khawatir ke depan guru yang akan disalahkan jika terjadi keracunan karena berstatus penanggung jawab.

Kenapa Anda mengkritik besaran insentif? Saat ini Posko Pengaduan P2G

menerima 518 guru honorar yang 97 persen belum menerima program bantuan insentif sebesar 300 ribu perbulan atau 10 ribu perhari yang telah dijanjikan.

Jika BGN bisa memberikan insentif 100 ribu per hari untuk guru penanggung jawab MBG, bukankah mudah saja bagi Pemerintah jika menggaji guru honorar.

Apa harapan Anda dengan adanya program insentif bagi guru ini? Kami berharap Pemerintah melakukan evaluasi dan memperbaiki tata kelola MBG sehingga tepat sasaran dengan prinsip selektif.

Dan kami menolak guru dijadikan Penanggung Jawab MBG di sekolah.

Kenapa? MBG harus tepat sasaran, selektif ke sekolah yang latar belakang orang tuanya ekonomi lemah. MBG cocok dilakukan di wilayah 3 T (daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia). ■ REN